



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GST. MADE NGR. KUSWANDANA
2. Jabatan : INSPEKTUR IV
3. NHK : 112565

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/138 m² di KOTA DEPOK ,
WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m²/48 m² di KOTA DEPOK ,
WARISAN Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m²/80 m² di KOTA DEPOK ,
WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/21 m² di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 86.294.914

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 895.294.914

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 895.294.914

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.